

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN LELANG MOBIL DINAS (Studi Kasus Di Lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI Tahun 2022).

Sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik atau digitalisasi menjadi prioritas bagi semua sektor di era saat ini, termasuk sektor pemerintahan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui *pertama* bagaimana pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022. *Kedua* bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022.

Beberapa jenis jual beli diantaranya sewa menyewa, usaha bagi hasil dan lelang adalah beberapa contoh dalam bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda dengan uang ataupun saling memberikan antara orang lain dan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan secara umum dengan penawaran harga yang meningkat.

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang datanya bersifat deskriptif, Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini tidak dimulai dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan dimulai dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami.

Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa Mekanisme lelang dibagi menjadi 2 bagian: 1. Bagian Barang bisa di lelang. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak hanya sekadar pengelolaan administratif semata, tetapi lebih pada pengelolaan BMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk memberikan nilai tambah. Salah satu siklus pengelolaan BMN yang penting adalah penghapusan BMN. 2. Bagian proses lelang sesudah masuk ke KPKNL. Setelah melakukan penelitian di Lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), terjadi beberapa poin yang bisa diamati dan dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Mekanisme lelang yang dilakukan di Lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad lelang. Pelaksanaan lelang di Lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam perspektif Fatwa DSN MUI. Dalam pelaksanaan lelang di Lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI belum sesuai dengan aturan DSN MUI tentang lelang karena mekanismenya dan barang yang disediakan belum sesuai dengan yang ada didesripsi.

Kata Kunci : Lelang, Kendaraan Dinas